

**IMPLIKASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(PNPM) MANDIRI
PEDESAAN
TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KECIL
DIKECAMATAN LANGGAM KABUPATEN PELALAWAN
PROPINSI RIAU TAHUN 2007 - 2010**

Yusbar Yusuf, Rita Yani Iyan dan Edwin Saputra

Jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap pendapatan pedagang kecil di kecamatan langgam kabupaten pelelawan propinsi riau selama periode 2007 – 2010.

Populasi pedagang kecil yang terdapat di kecamatan langgam kabupaten Pelelawan sebanyak 1224. Dari jumlah tersebut yang menerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan sebanyak 226 pedagang, yang tidak menerima 898 pedagang.

Dari hasil penelitian di ketahui juga, bahwa yang menyebabkan tidak semua pedagang kecil bisa mendapat pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan adalah didominasi oleh faktor kondisi laba usaha atau sisa hasil usaha yang tidak jelas yaitu sebanyak 41,18%. Di susul oleh kondisi ekonomi anggota kelompok sebagian besar tidak miskin yaitu sebanyak 23,53%, dan tujuan penggunaan pinjaman oleh pemanfaat tidak untuk kegiatan produktif yaitu sebanyak 17,65%. Faktor lain yang menyebabkan kelompok pemohon tidak bisa mendapatkan pinjaman adalah faktor dana yang terbatas.

Hasil uji jenjang Mann-Whitney memperlihatkan bahwa tingkat pendapatan pedagang kecil penerima pinjaman lebih besar dari tingkat pendapatan pedagang kecil bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Kata Kunci : Laba usaha, kondisi ekonomi, kegiatan produktif, dana terbatas

PENDAHULUAN

Setiap konsep pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kesejahteraan tersebut akan dapat dicapai apabila pembangunan dilakukan dengan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yaitu PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Ini sesuai dengan tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (PTO PNPM Mandiri Pedesaan, 2008:1)

Program ini tidak hanya bersifat strategis karena dalam kegiatannya menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antardesa dan disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang menguat bagi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang.

Bantuan kepada masyarakat miskin ini diberikan dalam bentuk dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai pendampingan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Pedesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka dilaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir yang menjadi salah satu bentuk kegiatan yang memberikan kemudahan bagi rumah tangga miskin untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari unit pengelola kegiatan (UPK) yang digunakan oleh masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat, kemudian dana tersebut tidak habis begitu saja tetapi diputar kembali untuk memberdayakan masyarakat. Jadi jelas bahwa kebijaksanaan pemerintah dimaksudkan agar masyarakat tertolong kebutuhannya dalam mendapatkan modal untuk berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatannya.

Sedangkan jenis kelompok sasaran dalam kegiatan dana bergulir adalah :

1. Kelompok Simpan Pinjam (KSP): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM,
2. Kelompok Usaha Bersama (KUB): adalah kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok, dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM,
3. Kelompok Aneka Usaha: adalah kelompok yang anggotanya RTM yang mempunyai usaha yang dikelola secara individual oleh anggota.

Adanya pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan usaha ekonomi lemah terutama bagi pedagang kecil, sehingga diharapkan dapat membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya.

Salah satu daerah yang memanfaatkan program pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri ini adalah Kecamatan Langgam yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Pinjaman dana bergulir telah berjalan lebih kurang selama empat tahun, dimana dana pinjaman ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu 25% dari total anggaran untuk seluruh kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.

Selain dari APBN dan APBD tersebut dana pinjaman ini berasal dari pengembalian dan bunga yang dibayar oleh peminjam sebelumnya untuk digulirkan kembali. Jadi kombinasi dari ketiga sumber dana tersebutlah yang akan digulirkan sebagai pinjaman kepada masyarakat. Untuk melihat lebih jelas tentang alokasi dan perguliran pinjaman dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Alokasi, Perguliran, Jumlah Kelompok dan Jumlah Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam Tahun 2007-2010

| Tahun | Alokasi Pinjaman (Rupiah) | Jumlah Perguliran Pinjaman (Rupiah) | Jumlah Kelompok Peminjam | Jumlah Pemanfaat (Orang) |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2007 | 174.000.000 | 615.000.000 | 26 | 164 |
| 2008 | 254.000.000 | 1.103.000.000 | 47 | 421 |
| 2009 | 204.000.000 | 811.000.000 | 36 | 326 |
| 2010 | 195.000.000 | *1555.000.000 | 17 | 149 |

Keterangan : *) Januari s/d April

Sumber: Laporan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Langgam

Permasalahan terjadi pada tahun 2009, yaitu jumlah penerima pinjaman dana bergulir semakin berkurang hal ini dipicu oleh berkurangnya alokasi dan dana perguliran pinjaman yang disebabkan oleh banyaknya tunggakan. Tercatat hingga Maret 2010 jumlah tunggakan mencapai Rp. 312.000.000. Dengan berkurangnya alokasi dan perguliran pinjaman jelas akan dengan sendirinya menyebabkan berkurangnya jumlah penerima pinjaman.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut kaidah ekonomi, pemberdayaan masyarakat adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan *surplus value* sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi atau melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri.

2. Pendapatan

Salah satu tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Dalam suatu perekonomian, pendapatan merupakan faktor yang terpenting, karena dengan adanya pendapatan maka kegiatan ekonomi dapat berjalan. Dalam artian ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga, oleh sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/ upah, sewa, bunga serta keuntungan/ *profit*. (Sukirno, 2000: 42).

3. Usaha Pedagang Kecil

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria usaha kecil adalah:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 s/d Rp. 2.500.000.000,00.

Berdasarkan kriteria tersebut terdapat perbedaan kriteria usaha kecil di Indonesia, dimana Departemen Perindustrian, Perbankan, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menggunakan kriteria modal dan pembagian usaha, sementara Departemen Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kriteria tenaga kerja dalam pembagian usaha, dimana usaha kecil menggunakan tenaga kerja sebanyak 5-19 orang sedangkan usaha menengah menggunakan tenaga kerja sebanyak 20-99 orang (Wiranta, 2005: 15-19).

Salah satu usaha kecil yang dilakoni masyarakat adalah usaha perdagangan, khususnya yang berskala kecil. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dimaksud usaha pedagang kecil adalah suatu jenis usaha eceran kecil yang menggunakan bangunan dan tempat tetap, serta biasanya dikelola oleh keluarga atau oleh lebih seorang petugas (yang melayani dan membantu). Usaha pedagang kecil sebagai salah satu jenis usaha eceran merupakan ujung tombak yang berhadapan langsung dengan konsumen. Pedagang kecil atau pengecer (Swastha 2001:192) adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui tingkat perbedaan pendapatan pedagang kecil penerima pinjaman dengan pedagang kecil bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam, digunakan uji jenjang Mann-Whitney (U-Test) sebagai berikut:

$$Z = \frac{U - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}$$

Dimana :

Z = Tingkat perbedaan pendapatan pedagang kecil penerima pinjaman dengan pedagang kecil bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan.

U = Nilai terkecil dari nilai sampel

n1 = Jumlah sampel kelompok pedagang kecil penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan

n2 = Jumlah sampel kelompok pedagang kecil bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan

Dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

H_0 ditolak apabila : $Z > Z_{\alpha/2}$ atau $-Z < -Z_{\alpha/2}$

H_0 diterima apabila : $-Z_{\alpha/2} \leq Z \leq Z_{\alpha/2}$

Tingkat kepercayaan : $\alpha = 0,05$

n1 = 69

n2 = 90

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Semua Pedagang Kecil Bisa Memperoleh Pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Langgam, pada tahun 2009 jumlah penerima pinjaman dana bergulir semakin berkurang hal ini dipicu oleh berkurangnya alokasi dana dan perguliran pinjaman yang disebabkan oleh banyaknya tunggakan. Tercatat hingga Desember 2009 jumlah tunggakan mencapai Rp. 312.658.293. Dengan berkurangnya alokasi dan perguliran pinjaman tersebut, jelas akan dengan sendirinya menyebabkan berkurangnya jumlah penerima pinjaman. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : Jumlah Surplus/ Defisit, Jumlah Kelompok Peminjam dan Jumlah Pemanfaat Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam Tahun 2007-2010

| Tahun | Jumlah Surplus/ Defisit (Rupiah) | Jumlah Kelompok Pemohon | Jumlah Kelompok Peminjam | Jumlah Peminjam |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 2007 | 343.991.034 | 26 | 26 | 164 |
| 2008 | (271.655.016) | 49 | 47 | 421 |
| 2009 | (312.658.293) | 53 | 36 | 326 |
| 2010*) | - | 29 | 17 | 149 |

Keterangan : *) Januari s/d April

Sumber : Laporan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Langgam

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada akhir tahun 2007 UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Langgam memperoleh surplus sebesar Rp. 343.991.034 sehingga jumlah kelompok peminjam pada tahun 2008 naik menjadi 47 kelompok dan 421 orang peminjam. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu akhir tahun 2008 UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Langgam mengalami defisit yang disebabkan oleh tunggakan peminjam dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp. 271.655.016 sehingga jumlah kelompok peminjam pada tahun 2009 turun menjadi 36 kelompok dari 53 kelompok yang mengajukan pinjaman dan 326 orang pemanfaat. Begitu juga pada akhir tahun 2009 UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Langgam kembali mengalami defisit disebabkan oleh tunggakan peminjam dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp. 312.658.293.

Jadi seiring dengan bertambahnya jumlah tunggakan pinjaman dana bergulir tersebut menyebabkan semakin berkurangnya perguliran dana pinjaman PNPM Mandiri Pedesaan yang berdampak terhadap turunnya jumlah pemanfaat pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan tersebut. Dengan berkurangnya jumlah perguliran pinjaman dana tersebut mengakibatkan tidak semua masyarakat yang mengajukan pinjaman bisa memperolehnya termasuk pedagang kecil, yaitu tidak semua pedagang kecil yang mengajukan usulan pinjaman bisa mendapatkannya.

Kemudian selain itu, pihak PNPM Mandiri Pedesaan perlu melakukan seleksi oleh Tim Verifikasi terhadap pemohon yang mengajukan usulan pinjaman yang akan dibahas dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan. MAD Prioritas Usulan ini akan membahas apakah pemohon yang mengajukan usulan pinjaman telah memenuhi syarat atau kriteria yang sudah ditentukan, melihat kesesuaian kebutuhan atau kelayakan dari semua usulan desa, dan memberikan rekomendasi kelayakan suatu usulan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam MAD Prioritas usulan.

Pada tahun 2009 ada 53 kelompok yang mengajukan permohonan pinjaman, tetapi hanya 36 kelompok yang bisa memperoleh pinjaman dana tersebut artinya ada 17 kelompok yang tidak diterima usulan pinjamannya. Berdasarkan lembar verifikasi yang ada pada Tim verifikasi PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok yang pernah mengajukan permohonan pinjaman tetapi tidak diterima usulan pinjamannya disebabkan oleh kelayakan usahanya diragukan yaitu pendapatan atau hasil keuntungan dari usaha dan struktur modalnya tidak jelas. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : Rekap Penilaian/ Verifikasi Kelompok Pemohon yang Tidak Mendapat Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Tahun 2009

| No. | Aspek Penilaian | Jumlah Kelompok | % |
|-----|---|-----------------|-------|
| 1 | Ikatan pemersatu kelompok tidak karena aktifitas ekonomi atau kemasyarakatan | 0 | 0 |
| 2 | Kekuatan ikatan pemersatu tidak baik dan lemah | 0 | 0 |
| 3 | Kepengurusan kelompok tidak dipilih secara demokratis oleh anggota kelompok | 0 | 0 |
| 4 | Keterkaitan anggota kelompok lemah | 0 | 0 |
| 5 | Pertemuan anggota kelompok tidak secara rutin | 0 | 0 |
| 6 | Sebagian besar anggota tidak mempunyai usaha yang dapat dikembangkan | 0 | 0 |
| 7 | Kondisi ekonomi anggota kelompok sebagian besar tidak miskin | 4 | 23,53 |
| 8 | Anggota kelompok tidak mempunyai ikatan tanggung renteng | 0 | 0 |
| 9 | Anggota kelompok sebagian besar tidak saling mengenal | 0 | 0 |
| 10 | Sebagian besar anggota tidak mengikuti pertemuan PNPM Mandiri Pedesaan | 0 | 0 |
| 11 | Struktur Permodalan bukan modal sendiri | 0 | 0 |
| 12 | Hutang luar lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri | 1 | 5,88 |
| 13 | Penyebaran simpanan anggota/ permodalan tidak merata pada setiap anggota | 0 | 0 |
| 14 | Pertumbuhan struktur permodalan tidak meningkat (tetap) dari tahun ke tahun | 0 | 0 |
| 15 | Struktur penyebaran pinjaman pada sebagian besar anggota kelompok tidak jelas | 0 | 0 |
| 16 | Tujuan penggunaan pinjaman oleh pemanfaat (anggota kelompok) tidak untuk kegiatan produktif | 3 | 17,65 |
| 17 | Kondisi tunggakan pinjaman anggota di atas 25% | 0 | 0 |
| 18 | Prosedur penyaluran pinjaman yang dimiliki dan dijalankan oleh kelompok tidak jelas | 0 | 0 |
| 19 | Pengurus kelompok kurang mempunyai komitmen yang baik terhadap kemajuan kelompok | 0 | 0 |
| 20 | Kapasitas pengurus dalam administrasi kegiatan dan keuangan kurang | 0 | 0 |
| 21 | Kapasitas pengurus dalam pengelolaan dana simpanan dan pinjaman | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------|
| | kurang | | |
| 22 | Kelompok mempunyai pertumbuhan pendapatan yang tidak jelas | 2 | 11,76 |
| 23 | Kondisi biaya operasional pada kelompok tidak jelas | 0 | 0 |
| 24 | Kondisi laba usaha atau sisa hasil usaha tidak jelas | 7 | 41,18 |
| 25 | Kelompok mempunyai perencanaan keuangan yang tidak jelas | 0 | 0 |
| 26 | Rencana tambahan penyaluran pinjaman tidak dapat dicapai | 0 | 0 |
| 27 | Rencana pertumbuhan simpanan tidak dapat dicapai | 0 | 0 |
| 28 | Penambahan jumlah anggota kelompok tidak dapat dicapai | 0 | 0 |
| 29 | Perbandingan tunggakan dan pinjaman tidak akan menurun pada waktu yang akan datang | 0 | 0 |
| 30 | Rencana tambahan penyaluran pinjaman sebagian besar tidak untuk masyarakat miskin | 0 | 0 |
| Jumlah | | 17 | 100 |

Sumber : Laporan Tim Verifikasi PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Langgam, Tahun 2009

Didalam proposal pengajuan usulan pinjaman, kelompok pemohon harus menguraikan hasil keuntungan atau laba yang akan diperoleh melalui usaha yang akan dibuatnya. Apabila usaha yang akan dibuat tersebut diperkirakan memperoleh keuntungan dan disetujui oleh Tim verifikasi maka usaha tersebut layak untuk diberi pinjaman. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa faktor penyebab terbesar kelompok pemohon tidak bisa mendapatkan pinjaman adalah kondisi laba usaha atau sisa hasil usaha tidak jelas, yaitu sebanyak 7 kelompok atau 41,18%.

Faktor penyebab kedua adalah kondisi ekonomi anggota kelompok sebagian besar tidak miskin yaitu sebanyak 4 kelompok atau 23,53%, artinya rumah tangga miskin tidak terwakili. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan PNPM mandiri Pedesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Pedesaan. Jadi yang berhak menerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan adalah rumah tangga miskin, masyarakat golongan menengah ke atas disarankan untuk menggunakan jasa lembaga keuangan.

Selanjutnya faktor penyebab ketiga adalah tujuan penggunaan pinjaman oleh pemanfaat (anggota kelompok) tidak untuk kegiatan produktif yaitu sebanyak 3 kelompok atau 17,65%. Maksudnya adalah pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan harus digunakan untuk kegiatan yang bersifat modal usaha, bukan untuk membeli keperluan yang bersifat tidak produktif misalnya untuk membeli televisi, membuat atau memperbaiki rumah dan lain sebagainya.

Kemudian faktor keempat adalah kelompok mempunyai pertumbuhan pendapatan yang kurang baik atau tidak jelas yaitu sebanyak 2 kelompok atau 11,76%. Ini ditujukan untuk pemanfaat yang usahanya telah berjalan, bagaimana pertumbuhan pendapatannya dari waktu ke waktu. Apabila pertumbuhannya baik maka usaha tersebut layak diberi pinjaman sebagai bantuan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan sebaliknya apabila pertumbuhan pendapatannya tidak jelas, maka usaha tersebut tidak layak diberi pinjaman. Faktor yang terakhir adalah hutang luar lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri yaitu sebanyak 1 kelompok atau 5,88%. Pinjaman dan bergulir PNPM Mandiri Pedesaan diutamakan untuk pengusaha kecil yang struktur modalnya adalah hutang luar lebih besar dari modal sendiri, ini bertujuan membantu pengusaha kecil tersebut agar modal milik sendiri lebih besar dan bisa keluar dari belenggu hutangnya. Apabila struktur modalnya hutang luar lebih kecil dari modal sendiri berarti pengusaha tersebut sudah mulai mandiri dan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan.

Jadi, faktor kondisi laba usaha atau sisa hasil usaha tidak jelas, kondisi ekonomi anggota kelompok sebagian besar tidak miskin, tujuan penggunaan pinjaman oleh pemanfaat (anggota kelompok) tidak untuk kegiatan produktif, kelompok mempunyai pertumbuhan pendapatan yang kurang baik atau tidak jelas, dan hutang luar lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri adalah penyebab tidak semua

kelompok pemohon mendapatkan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam termasuk pedagang kecil.

2. Perbedaan Pendapatan Pedagang Kecil Penerima Pinjaman dengan Pedagang Kecil Bukan Penerima Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam

Dari tabel V.11 dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan rata-rata yang diperoleh pedagang kecil penerima pinjaman lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendapatan rata-rata pedagang kecil yang bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Untuk mengetahui tingkat perbedaan pendapatan pedagang kecil penerima pinjaman dengan pedagang kecil bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam, maka dalam penulisan ini menggunakan uji Mann-Whitney (U-Test) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{U - \frac{n_1 \cdot n_2}{2}}{\sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}}}$$

Setelah dilakukan pengujian perhitungan Uji Mann Whitney (pada lampiran 4), maka perlu dilakukan pengujian hipotesa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta = 0, H_1 : \beta \neq 0$

2. $\alpha = 0,05$

3. Daerah Kritis

$$-Z > Z_{\alpha/2} \text{ atau } Z < -Z_{\alpha/2}$$

$$Z_{\text{tab}} = Z_{\alpha/2}$$

$$= Z_{0,05/2}$$

$$= Z_{0,025}$$

$$= Z_{0,5-0,025}$$

$$= Z_{0,4750}$$

$$= 1,96$$

4. Z hitung

Dari perhitungan pada lampiran 4, maka dapat diketahui bahwa Z hitung

3. adalah (Z) = -5,413

5. Kesimpulan

Menarik kesimpulan dengan membandingkan:

$$-Z > Z_{\alpha/2} : -(-5,413) > 1,96$$

:

$$5,413 > 1,96$$

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pendapatan pedagang kecil penerima pinjaman dengan pedagang kecil bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan. Dimana pendapatan rata-rata yang diperoleh pedagang kecil penerima pinjaman lebih besar dibandingkan dengan pedagang kecil bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pengamatan dan kajian yang dilakukan , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak semua pedagang kecil bisa mendapat pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan adalah faktor kondisi laba usaha atau sisa hasil usaha yang tidak jelas yaitu sebanyak 41,18%. Kemudian kondisi ekonomi anggota kelompok sebagian besar tidak miskin yaitu sebanyak 23,53%. Di samping itu, aspek tujuan penggunaan pinjaman oleh calon pemanfaat (anggota kelompok) tidak untuk kegiatan produktif yaitu sebanyak 17,65%, kelompok mempunyai pertumbuhan pendapatan yang kurang baik atau tidak jelas yaitu sebanyak 11,76%, dan hutang luar lebih kecil dibandingkan dengan modal sendiri yaitu sebanyak 5,88%. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kelompok pemohon tidak bisa mendapatkan pinjaman adalah faktor dana yang terbatas.
2. Hasil perhitungan dengan menggunakan uji jenjang Mann-Whitney (U-test), maka diperoleh hasil $-Z > Z_{\alpha/2}$: $5,413 > 1,96$, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan ditolaknya H_0 , memberi indikasi bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara pedagang kecil penerima pinjaman dengan pedagang kecil bukan penerima pinjaman yaitu tingkat pendapatan pedagang kecil penerima pinjaman lebih besar dari tingkat pendapatan pedagang kecil bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan beberapa temuan dan kesimpulan , maka saran atau masukan yang perlu disampaikan untuk seluruh pihak terkait dalam upaya pengelolaan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna adalah sebagai berikut:

1. Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk di dalamnya pedagang kecil ini perlu didukung oleh alokasi dana baik dari APBN maupun APBD agar usaha ini tidak kekurangan modal sehingga diharapkan pembinaan kepada pedagang kecil dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Diharapkan kepada Unit Pengelola Kegiatan atau Tim Verifikasi PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Langgam agar lebih menelaah usulan pinjaman atau membuat prioritas (usaha apa yang diutamakan) yang diajukan pedagang kecil supaya semua pedagang kecil bisa mendapatkan pinjaman dari PNPM Mandiri Pedesaan.
3. Khusus untuk kelompok atau pedagang kecil yang bukan penerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Pedesaan tetapi pernah mengajukan pinjaman (kelompok pemohon) kepada PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Langgam agar meninjau kembali kajian keuntungan (kelayakan) dari usaha yang akan dilakukan dan diharapkan agar di dalam kelompok pemohon tersebut terdiri dari rumah tangga miskin, sedangkan untuk masyarakat menengah ke atas disarankan menggunakan jasa lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2000, *Indikator Pemerataan Pendapatan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*, Jakarta.
- Case, Karl. E dan Ray C. Fair, 2002, *Prinsip-Prinsip Ekoonomi Mikro Edisi ke V*, Liberty, Yogyakarta.
- Gunadi, Aloysius, 2002, *Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi*, Lembaga Penelitian Universitas Atmadja, Yogyakarta.
- Husein, Umar, 2003, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Manik, Muhibbullah Azfa, 2005, *Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Berbasis Agroindustri di*

- Pedesaan*, Skripsi: Fakultas Teknologi Industri, Universitas Bung Hatta, Padang.
- Marzuki, Laica, 2003. *Jurnal Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan* hal. 29-36: “Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal”, Jakarta.
- Miller, Roger L dan Mainers, Roger E, 2000, *Teori Ekonomi Mikro Intermediate*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- PNPM Mandiri Pedesaan, 2007-2010, *Laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Langgam*. -----, 2008, *Pengelolaan Dana Bergulir*, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2004, *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi*, makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.
- Sumawinata, Sarbini, 2004, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suyanto, Bagong, 2008, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik* edisi 3 hal. 26-36: “Perangkap Kemiskinan dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin”, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Swastha, Basu, 2001, *Azas-Azas Marketing*, Liberty, Yogyakarta.
- Wardani, Tri, 2003, *Pengaruh Pemanfaatan Kredit Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kecil Di Kabupaten Temanggung*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Wiranta, Sukarna, 2005, *Manajemen Usahawan Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Zulkarnain, 2006, *Kewirausahaan: Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.